



LAPORAN KINERJA

2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana dengan indikator Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan 1 (satu) sasaran pendukung yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 05 Februari 2024

PIL. KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	NOTIFIKASI Tercapai  Tidak Tercapai 	CAPAIAN KINERJA
I. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	→	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) = 0,60 (133,33%)
II. Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	→	1. Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana = 97,72 %
III. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	→	1. NILAI SAKIP = 83,05 (baseline 2022) = 103,81 %
a. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	→	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 91,46 %
b. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan	→	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 100%
c. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi	→	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%

d. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	→	1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 98,77%
1. Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang	→	1. Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0,08%
2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak	→	1. Cakupan warga negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 2,656%
3. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin bencana	→	1. Cakupan warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
4. Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	→	1. Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan = 100%
5. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat	→	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu = 100%
6. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	→	1. Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik = 90,62%
7. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	→	1. Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar = 100%
8. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	→	1. Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 100%
9. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	→	1. Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah = 99,76%
10. Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	→	1. Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi = 90,62%
11. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	→	1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 106,5%
12. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	→	1. Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik = 102,67%

DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vii</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>viii</i>
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	6
1.5 Sistematika Laporan	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Target Kinerja tahun 2021-2026	9
1. Visi dan Misi	10
2. Indikator Kinerja Sasaran	11
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja	17
 BAB IV PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.....	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	13
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023	14
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	16
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 6	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023	23
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.	24
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026).....	25
Tabel 9	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota	26
Tabel 10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	31
Tabel 11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	36
Tabel 13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah.....	37
Tabel 14	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38
Tabel 15	Alokasi Anggaran Bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	39
Tabel 16	SPM Urusan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	40
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	52
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	53
Tabel 19	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	54
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	56
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	56
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	57
Tabel 23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	59
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....	60
Tabel 26	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	67
Tabel 27	Permasalahan Solusi	70

DAFTAR GAMBAR

hal.

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	3
-----------------	---	---

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ...	2
Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	2
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023.....	18
Grafik 4 Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023	23
Grafik 5 Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2019 s.d 2023	28
Grafik 6 Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2023	29
Grafik 7 Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2023.	35
Grafik 8 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2023	43
Grafik 9 Nilai Sakip	55
Grafik 10 Realisasi Anggaran Tahun 2023	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas* : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
- Fungsi* : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

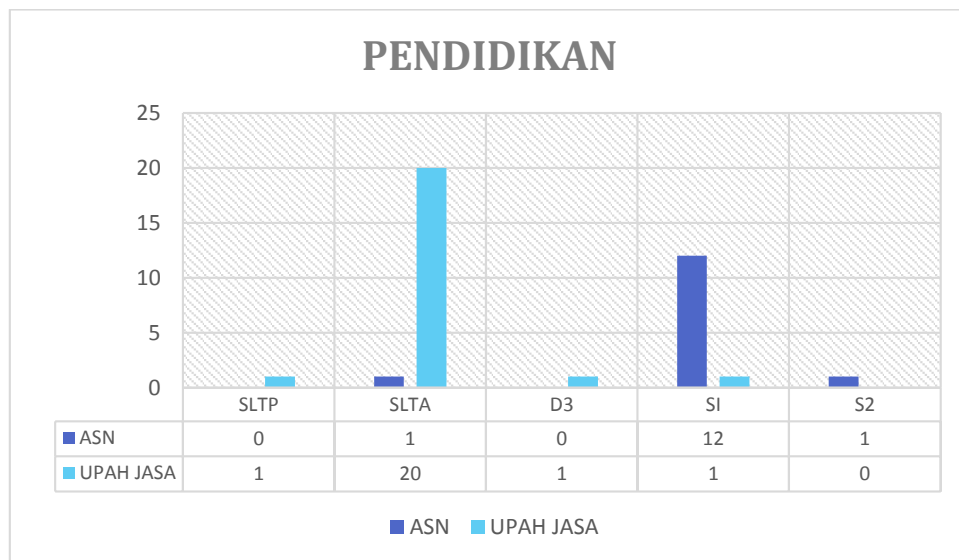
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

Sumber Daya Manusia (SDM)

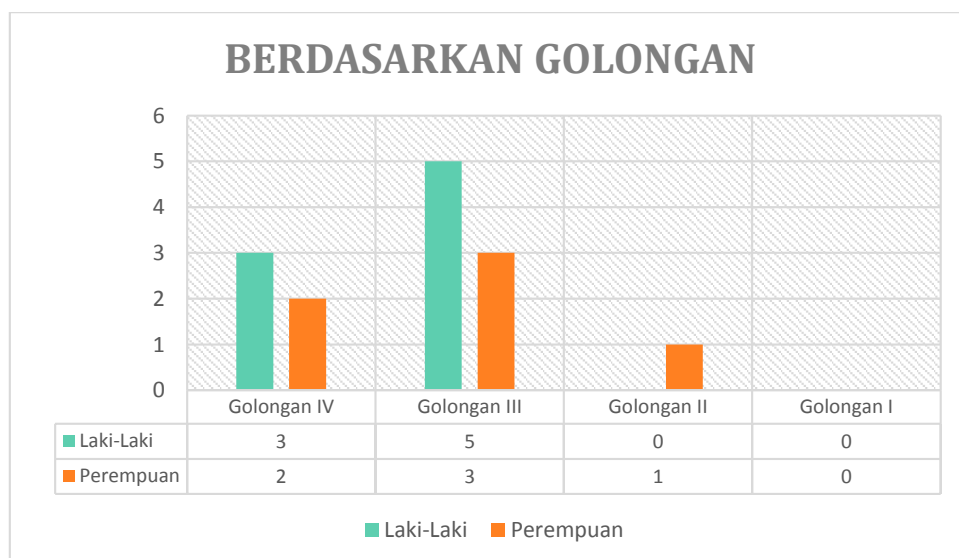
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 37 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 14 orang dan Tenaga Upah Jasa 23 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 21 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



Grafik. 1

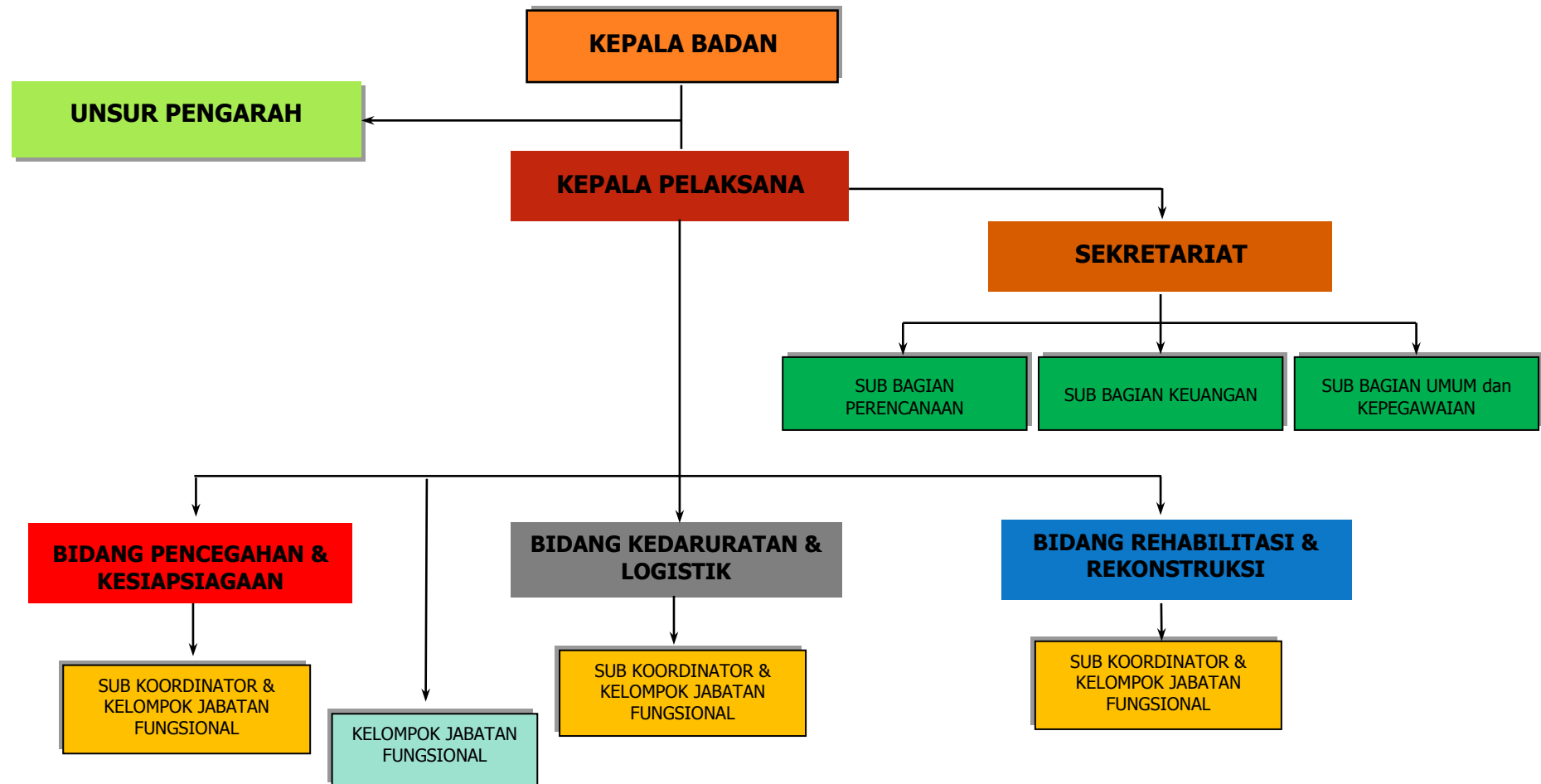
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana** (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana** (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu ***“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)”***. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana;
2. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
3. Meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana setiap tahun
4. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
5. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana
6. Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
7. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana
8. Belum optimalnya upaya pemulihan pasca bencana
9. Keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan
10. Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor
11. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

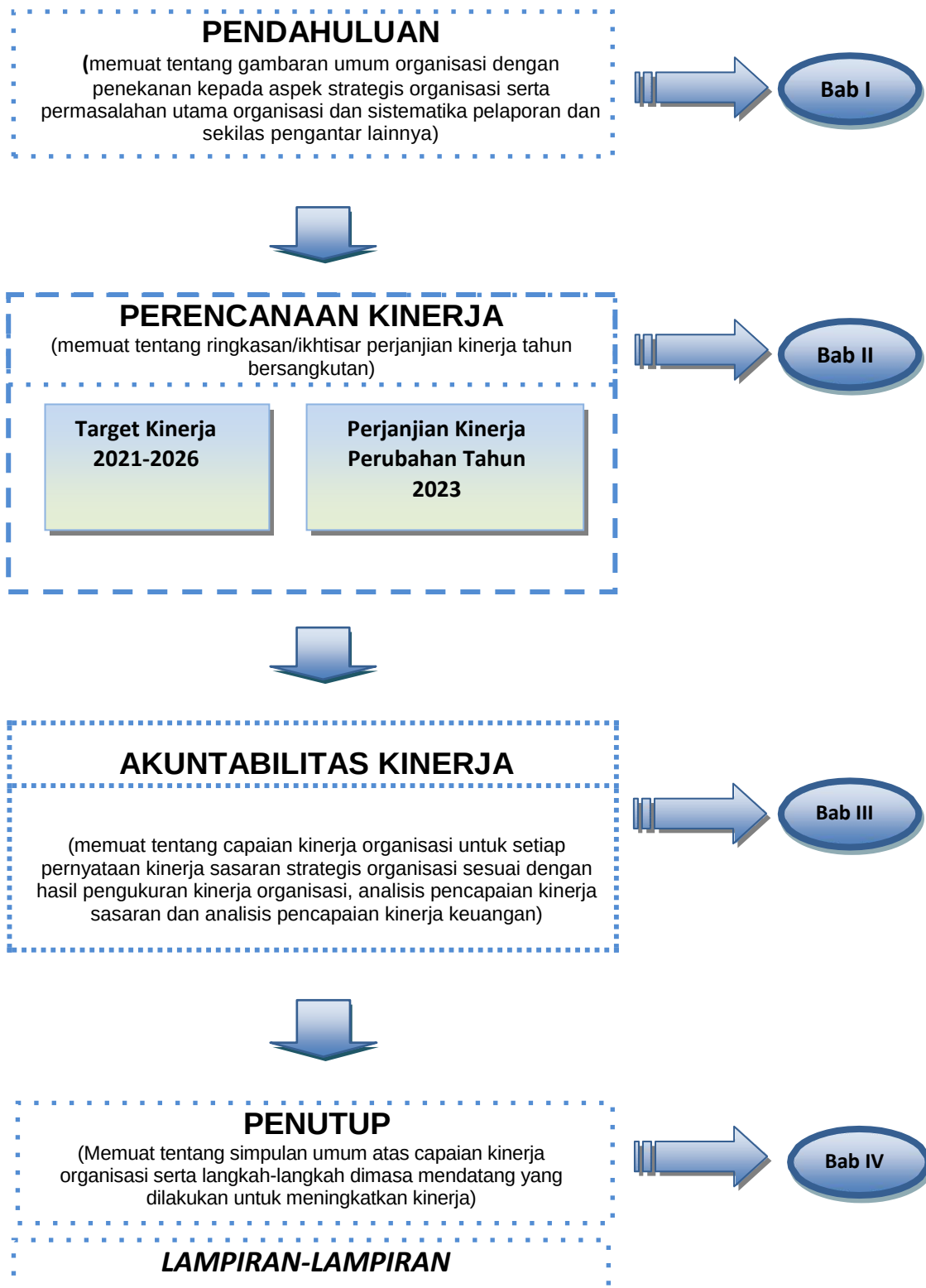
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Referensi Bab



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2021 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup 2 (dua) sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBP sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1 Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

2 Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke- 3 RPJMD

**“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan
lingkungan yang berkualitas”**

Sasaran 7 RPJMD

**“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan
bencana”**

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

Sasaran 8 RPJMD

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

Sasaran 9 RPJMD

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,50	0,50
2.	Meningkatkan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana	Persentase pemenuhan Layanan SPM Sub Urusan Bencana	100	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik	Indeks RB	BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	70	70	75	78	80	80	80	80

B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2023 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,45 (sedang)
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80 (A)

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 4.721.373.550,-** (*Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.624.140.173,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.580.593.377,-** dan belanja modal **Rp 516.640.000,-**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.847.919.108,-	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	1.873.454.442,-	APBD
JUMLAH		4.721.373.550,-	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang

digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

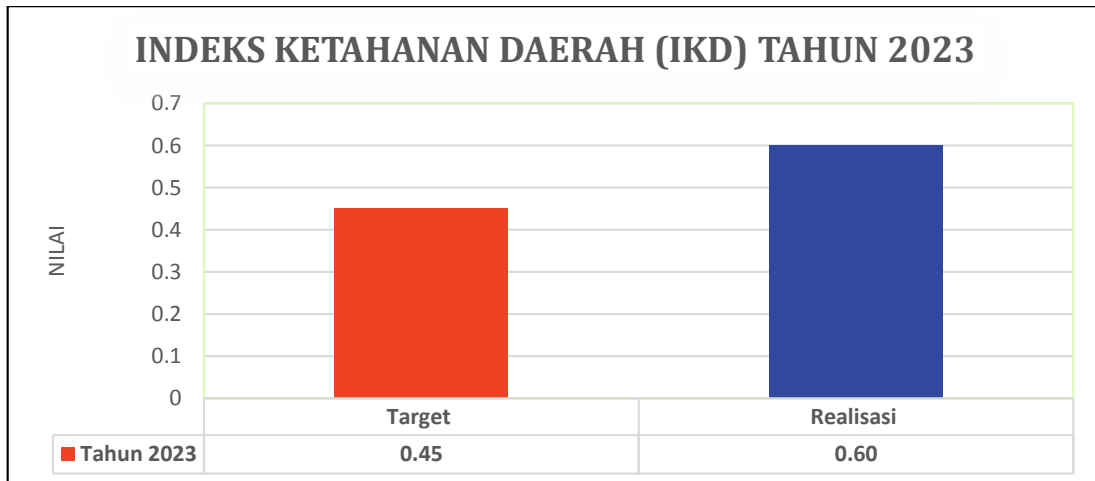
Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,45 %	0,60 %	133,33	●
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	97,72	97,72	●
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80	83,05	103,81	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I**Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana**

Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2023 adalah 0,45 dan realisasi sebesar 0,60 dengan persentase capaian kinerja 133,33%. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri yang dilaksanakan pada Bulan Nopember 2023 melalui tahapan Sosialisasi, FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dan Finalisasi yang diikuti oleh OPD terkait. Dalam pelaksanaan FGD didampingi oleh Fasilitator Nasional dan diperoleh hasil 0,60 (sedang). Hasil penilaian tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya diverifikasi akhir oleh BNPB pada Bulan Desember 2023. Adapun hasilnya akan dirilis oleh BNPB melalui BUKU IRBI Tahun 2023 yang akan diterbitkan pada Awal Tahun 2024.

Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2023 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas

Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, Dinas DAMKAR & Penyelamatan, TNI/POLRI dsb.

Penginputan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk menilai kapasitas daerah secara mandiri. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam KRB **data input** dalam **perhitungan IRBI**. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme 'pemutakhiran' bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD

- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
 - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
 - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
 - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
 - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
 - Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
 - SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
- PUSDALOPS BPBD
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
 - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
 - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
 - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.

4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
 - Penataan Ruang berbasis PRB
 - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
 - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospital Inco Soroako)
 - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
 - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
 - Pembentukan Forum Risiko Bencana Tingkat Kabupaten
 - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
 - Rehabilitasi tanggul sungai
 - Normalisasi/Restorasi sungai
 - Pembangunan Bendung Sungai
 - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
 - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
 - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
 - Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
 - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
 - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
 - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
 - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
 - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
 - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
 - Penentuan Status Darurat Bencana
 - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
 - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
 - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
 - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Penghentian Status Darurat Bencana

7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :

- Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
- Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap penurunan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur. Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah 152,28 dari target 202, dengan persentase capaian 132,65%.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. ***“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”***. IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. ***Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota***

**Grafik. 4**

Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82	0,60	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,76		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,73		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,60		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,56		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,35		

Tabel. 6

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana												Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,42	100 %	0,43	0,43	100 %	0,44	0,44	100 %	0,45	0,60	133,33 %	0.50 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yang signifikan. Hal ini karena pada penilaian IKD tahun 2023 yang telah dilaksanakan secara mandiri oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui Pelaksanaan FGD Tingkat kabupaten dengan melibatkan OPD terkait, Instansi Vertikal, BUMN dan Dunia Usaha, telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari penilaian IKD tahun 2022. Diantaranya yaitu Penyusunan Dokumen KRB, RPB, Rencana Kontinjensi Gempa Bumi, Pembentukan Forum PRB Tingkat Kabupaten, Kajian Risiko Bencana telah terintegrasi dalam penyusunan RDTR di beberapa kecamatan, telah dilakukan Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana dsb.

Penetapan target yang meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan target yang tertuang dalam Renstra BPBD 2021-2026.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, telah melampaui target yang direncanakan. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 – 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2023	Realisasi sampai dengan Tahun 2023		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,60	0,50 (sedang)	120%

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 yang dilakukan oleh BNPB diperoleh Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,60 dengan predikat sedang dari target yang direncanakan sebesar 0,45 dengan persentase capaian kinerja 133,33%. Nilai yang diperoleh Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,42 (sedang) yang merupakan hasil rata-rata nilai IKD dari 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi-Selatan. Dalam Penilaian IKD tidak ditetapkan Standar Nasional tetapi hanya score penilaian yaitu 0,01 s.d 0,39 kategori **Rendah**, 0,40 s.d 0,79 kategori **Sedang** dan 0,8 s.d 1 kategori **Tinggi**. Dan bila dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat I. Hal ini bisa tercapai karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini BPBD Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKD sebagai Indikator Kinerja Utama. Didukung dengan penganggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi dan FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Daerah. Pada pelaksanaan FGD tersebut menghadirkan OPD terkait sehingga diperoleh data dan informasi pendukung yang lebih akurat dan lengkap. Adapun perbandingan Nilai IKD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.9
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD TAHUN 2023
Kepulauan Selayar	0,41
Bulukumba	0,37
Bantaeng	Tidak menilai
Jeneponto	Tidak menilai
Takalar	Tidak menilai
Gowa	Tidak menilai
Sinjai	Tidak menilai
Maros	Tidak menilai
Pangkajene & Kepulauan	0,34
Barru	0,54
Bone	0,43
Soppeng	0,31
Wajo	0,55
Sidenreng Rappang	0,28
Pinrang	Tidak menilai
Enrekang	0,45
Luwu	0,35
Tana Toraja	Tidak menilai
Luwu Utara	0,59
LUWU TIMUR	0,60
Toraja Utara	0,27
Kota Makassar	Tidak menilai
Kota Pare-Pare	0,41
Kota Palopo	0,56

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :
 - Tersedianya Data Base (Baseline 2018-2022) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
 - Telah dilakukan pemutakhiran data IKD pada tahun 2023 oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 dengan melibatkan OPD terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha.

- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026, Penyusunan Dokumen KRB, Dokumen RPB dsb.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah karena telah menetapkan Mitigasi Bencana sebagai program prioritas kepala daerah dan dukungan penganggaran untuk kegiatan Mitigasi Bencana di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK).

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Belum maksimalnya partisipasi OPD terkait pada pelaksanaan FGD Penilaian IKD.

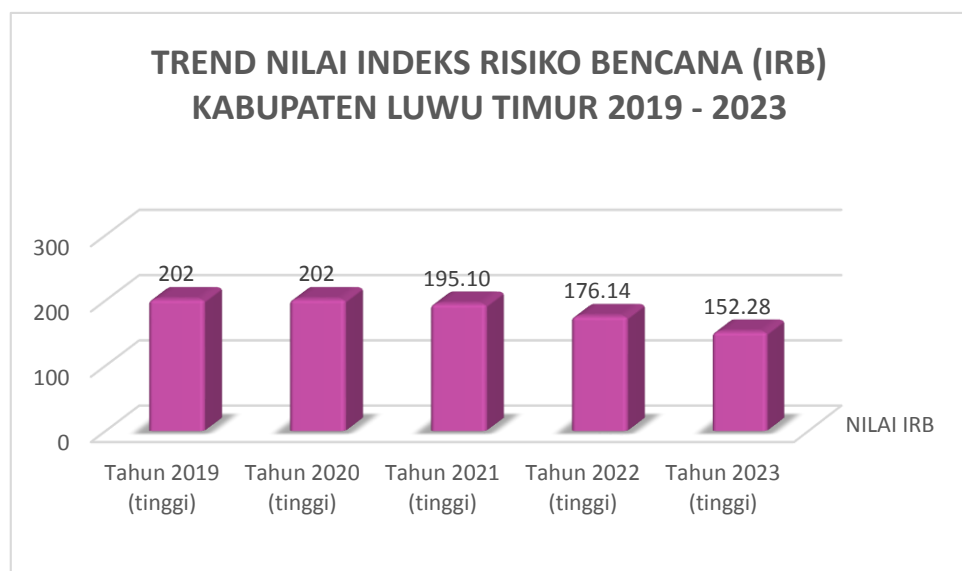
❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

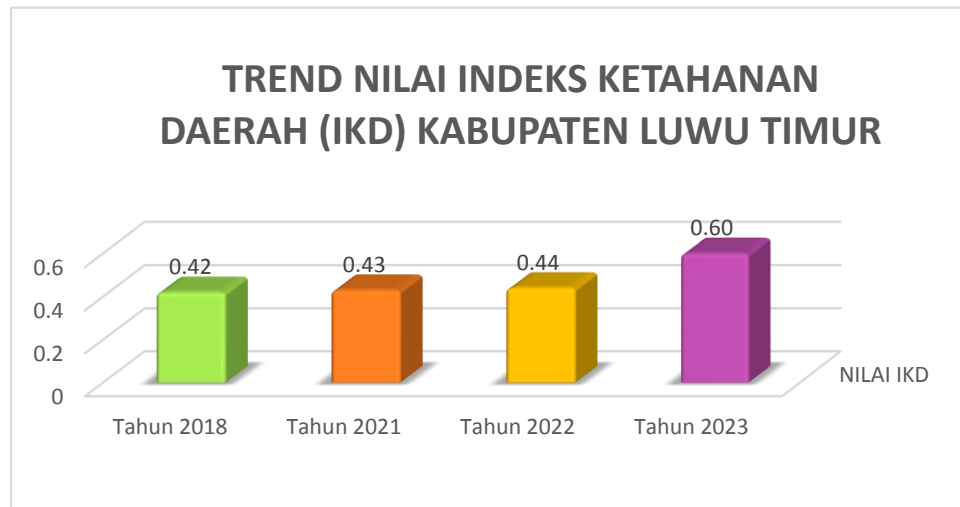
- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline.

❖ **Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana sudah dikatakan efektif atau berhasil, dengan melihat Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya yang dicapai melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Keberhasilan tersebut dicapai melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas OPD. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja tetapi didukung oleh OPD teknis terkait atau (Pentahelix Kebencanaan).



Grafik 5
Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2019 s.d 2023



Grafik 6
Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2023

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2023, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana melalui BPBD Provinsi Sul-Sel, daftar bantuan logistik Tahap I yaitu : Mie Instant 20 Dos, Logistik Pangan (Beras, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir, Madu Sachet, dan Multi Vitamin) 15 Paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta Gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut dan Sarung) 7 Paket, Perlengkapan Bayi (Minyak Telon, Popok, Bedak Bayi, Botol Susu, Baju dan Celana Bayi, selimut Bayi) 4 Paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut dan Alas Tidur) 10 Paket. Sedangkan Tahap II yaitu : Logistik Pangan (Air Mineral dan Beras) 20 Paket, Mie Instant 20 Dos, Selimut BNPB 10 Lembar, Makanan Siap Saji 18 Paket dan Sabun Mandi BNPB 2 Dos. Dan Tahap III yaitu Logistik Pangan 15 Paket (Gula 15 kg, Minyak Goreng 15 Ltr, Ikan Kaleng 30 buah, Mine Instant 30 dos, Beras 15 krg, air mineral 15 dos).

- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD, juga difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pencapaian target program prioritas (KP 1) Pemerintah Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh 125 desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan total anggaran Rp 1.250.000.000,- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan Peta Jalur Evakuasi Bencana di setiap desa. Capaian kinerja tersebut juga berdampak kepada Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat melihat langsung informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu FB, IG & Twitter yaitu [Pusdalops Bpbd Lutim](#).
- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 37 orang yang terdiri dari 13 orang PNS, PPPK 1 org, 2 orang Upah Jasa, dan 21 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan

prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.

- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Terkait Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana, telah diajukan Proposal ke BNPB dan telah di Verifikasi Oleh BNPB dengan Besaran Anggaran Rp 8.587.571.000,-.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,60	133,33%	1.873.454.442,-	1.450.508.054,-	77,42%
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	97,72%	97,72%			
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	91,46%	91,46%	196.640.642,-	136.888.800,-	70,33%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	480.740.600,-	300.456.700,-	62,50%

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	797.928.000,-	713.212.800,-	89,38%
Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%	100%	100%	400.145.200,-	299.949.754,-	74,96%

Tabel. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	133,33%	77,42%	22,58%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 133,33% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 77,42%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 22,58%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bukan hanya melekat pada BPBD saja tetapi didukung oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinsos P3A, Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, BKAD, Bapelitbangda, BKPSDM, Dinas PMD, DPRD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat. Dan dalam Upaya pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana, sangat dibutuhkan kolaborasi Pentahelik kebencanaan. Dan sebagai OPD pengampuh untuk pencapaian Indikator Kepala Daerah yaitu Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka BPBD sebagai leading sektor yang bertugas untuk melaksanakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD terkait dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk mengetahui seberapa besar kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Sehingga nantinya akan diperoleh data dan informasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh. Dan salah satu program yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dalam pencapaian sasaran yaitu Program Penanggulangan Bencana, dan melalui program tersebut, beberapa indikator dalam penilaian Ketangguhan daerah dapat dipenuhi. Seperti Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontingenji, Pengintegrasian dokumen KRB kedalam RTRW, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten, penyediaan logistik korban bencana, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca bencana, diklat kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Sosialisasi Rawan Bencana, Penyusunan Regulasi kebencanaan dsb.

Pada tahun 2023, Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana” dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu 133,33% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi IKD}}{\text{Target IKD}} \times 100 \\
 &= \frac{0,60}{0,45} \times 100 \\
 &= 133,33\%
 \end{aligned}$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 1.873.454.442,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.450.508.054,-** atau **77,42%**.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana



Grafik. 7
Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2023

Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : ***“Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)”***

Indeks .Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perhitungan indeks capaian SPM dilakukan melalui penginputan pada aplikasi SPM dengan **link <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>**.

Target Indikator sasaran 2 Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi Tahun 2023 adalah 97,72% dengan persentase capaian kinerja 97,72%. Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan karena salah satu layanan SPM yaitu Layanan Informasi Rawan Bencana yang realisasinya < 100%.

Layanan informasi rawan bencana dapat diberikan kepada Masyarakat melalui 3 metode yaitu sosialisasi melalui tatap muka dengan masyarakat di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia serta sosialisasi melalui papan informasi publik. Dari ketiga hal tersebut, salah satu metode penyebaran informasi melalui papan informasi publik yang ditempatkan di 3 kecamatan mengalami kerusakan (rusak berat). Hal inilah yang menyebabkan sehingga capaian penyebaran informasi menjadi tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 12
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran II :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100 %	84,21 %	84,21 %	100 %	97,71 %	97,71 %	100 %	97,72 %	97,72 %	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa layanan mutu dari ketiga layanan SPM tersebut telah realisasi misalnya telah dilaksanakan bimtek/diklat kebencanaan bagi TRC, penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial (FB, Instagram, Website) dan tatap muka langsung (sosialisasi rawan bencana) serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang realisasinya maksimal 100% begitu juga dengan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 – 2026)

Sasaran 2 :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2023	realisasi sampai dengan tahun 2023		
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	97,72	97,72	100	97,72%

Berdasarkan realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan untuk dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target 3 layanan dasar sub urusan bencana yaitu untuk layanan informasi rawan bencana dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dan papan himbauan peringatan dini bencana di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka langsung melalui pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait misalnya Pelaksanaan Penyusunan Peta Jalur Evakuasi Bencana melalui Dana BKK (Mitigasi Bencana) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dunia usaha dan Masyarakat. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana BMKG untuk deteksi Gempa Bumi Lokal dan yang bersumber dari luar wilayah Luwu Timur. Begitu juga untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan BASARNAS, pengerahan Tim Relawan, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 14

Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Target Nasional (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	91,46%	195.640.642,-	136.888.800,-	70,33%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	480.740.600,-	300.456.700,-	62,50%

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	797.928.000,-	713.212.800,-	89,38%
---	--	--	------	------	---------------	---------------	--------

Tabel. 15
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	2	3	4	5	6
		Program Penanggulangan Bencana	-	1.474.309.242,-	-
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	195.640.642,-	-
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	-	174.995.642,-	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	19.645.000,-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	480.740.600,-	-
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	175.270.300,-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	31.425.900,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	73.000.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	53.054.800,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	29.890.000,-	-
		Penyusunan Rencana Kontijensi	-	98.963.100,-	-

		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	19.136.500,-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	797.928.000,-	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	637.570.000,-	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	52.370.000,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	74.678.000,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	-	13,310,000,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	20.000.000,-	-

Tabel. 16
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana, (2). Terdapat Papan Himbuan Informasi Bencana di 3 Kecamatan dalam kondisi rusak berat.	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui PUSDALOPS Penanggulangan Bencana, Papan Himbuan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan pada OPD terkait yang menyediakan anggaran untuk Mitigasi Bencana struktural dan Non Struktural

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur
---	--	--	--	--

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

❖ Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu <100% yaitu :

- Pemahaman terkait pentingnya informasi kebencanaan belum merata di masyarakat
- Terbatasnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi kebencanaan
- Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan kebencanaan
- Belum maksimalnya pemahaman terkait konsep pelayanan dasar

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya sosialisasi
- Minimnya kualitas SDM penanggulangan bencana
- Keterbatasan anggaran
- Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana yang mengalami kerusakan

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan melalui papan informasi publik
- Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan

Dinas PMD terkait penggunaan Dana BKK untuk Mitigasi Bencana di desa, Dinas Sosial & P3A terkait penyediaan logistik untuk korban bencana, Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural dsb.

- Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM urusan bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat/pelatihan dan simulasi

6. Analisis Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di desa.
- Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru Kec. Tomoni dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

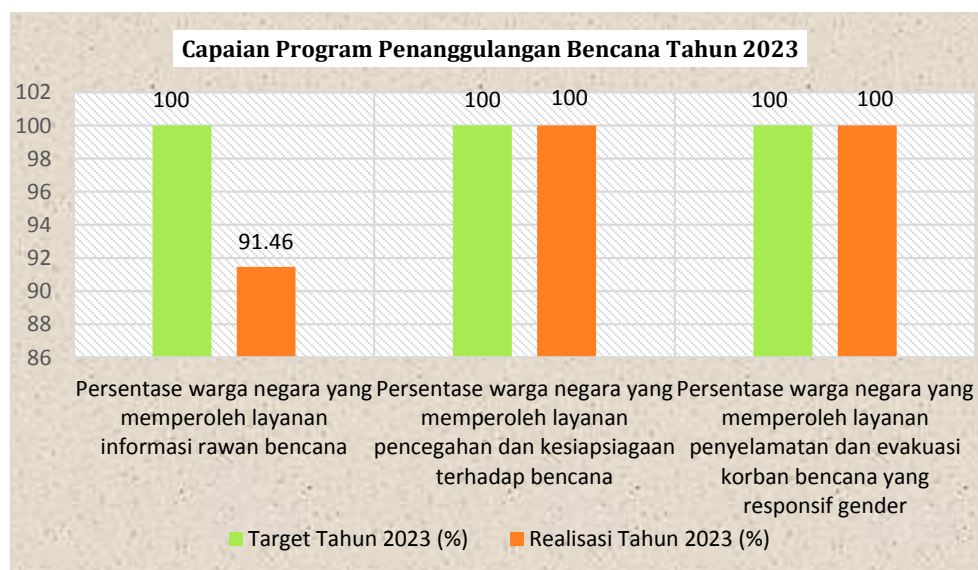
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)



Grafik. 8
Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2023

❖ **Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2023** adalah :a. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

$$= \frac{274.359}{302.039} \times 100$$

$$= 91,46\%$$

Target Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 91,46% dengan persentase capaian kinerja 91,46%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD, Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 10 kecamatan, Pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana dengan akumulasi jumlah masyarakat yang menerima layanan informasi sebesar 274.359 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa (masih menggunakan baseline awal). Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum tersedia papan himbauan informasi bencana karena kondisinya rusak berat, namun telah direncanakan dan dianggarkan pada tahun berikutnya.

[Dokumentasi Layanan Informasi Rawan Bencana](#)



Papan Himbauan Peringatan Dini



Rambu-Rambu Peringatan Daerah Rawan



Media Sosial BPBD



Sosialisasi KIE Rawan Bencana

- b. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

$$= \frac{302.039}{302.039} \times 100$$

$$= 100\%$$

Target Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pengembangan Kapasitas TRC, Penyusunan Dokumen KRB, Dokumen RPB, Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat deteksi gempa bumi sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur di Kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa (baseline data) memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Dokumentasi Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Bencana



Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana



Peserta Pelatihan Mitigasi



Apel Siaga Bencana



Peserta Apel Siaga Bencana



Lokakarya Pembentukan DESTANA



Peserta DESTANA



Pengembangan Kapasitas TRC



TRC-BPBD



Workshop Penyusunan KRB



Peserta Workshop KRB



FGD Penyusunan RPB



Peserta FGD RPB



Alat Pemantau Gempa Bumi Lokal



Alat Deteksi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami (INA Tews)



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Malili



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Kalaena



Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Tahun 2023



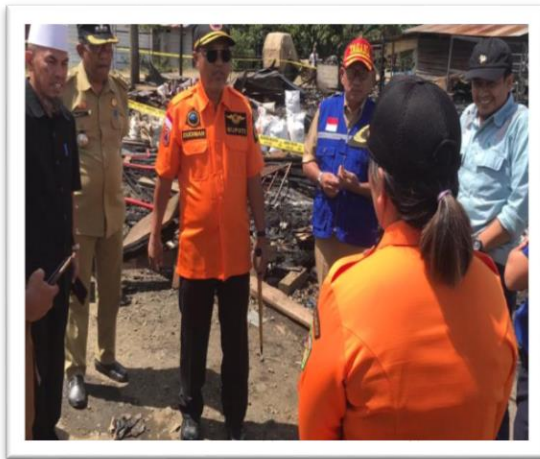
- d. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.

$$= \frac{1.283}{1.283} \times 100$$
$$= 100\%$$

Target tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 1.283 jiwa (633 laki-laki dan 650 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 341 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.

Dokumentasi Layanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana



Kunjungan Bupati ke lokasi bencana



Respon Cepat Kejadian Kebakaran



Respon Cepat Cuaca Ekstrem (Pohon Tumbang)



Pencarian orang hilang di Sungai Malili



Evakuasi Korban bencana

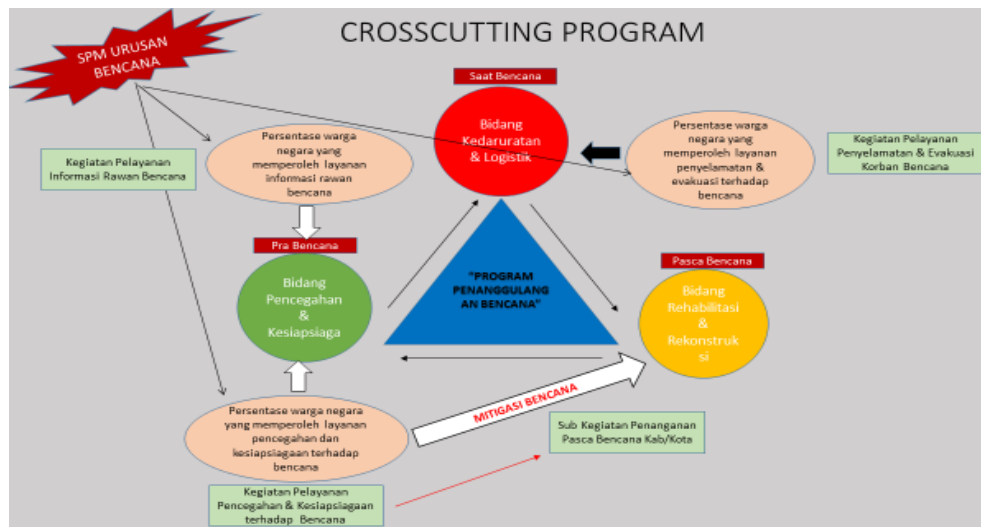


Penyaluran Bantuan Logistik Korban bencana



Kepala BPBD menyalurkan bantuan logis

Crosscutting Program Penanggulangan Bencana dalam Pencapaian SPM Sub Urusan bencana :



Pada tahun 2023, pencapaian SPM Sub Urusan Bencana pada Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub kegiatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%	0,08 %	100%
a.	Penyusunan Kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 org	250 org	100%

Tabel. 17
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,656	2,656%	100%
a.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
b.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	50 org	50 org	100%
c.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	21 unit	21 unit	100%
d.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4 Desa	4 Desa	100%
e.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	43 org	43 org	100%
f.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
g.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 org	250 org	100%

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 19
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%
e.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%

8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana yaitu 97,72% diperoleh dari rumus perhitungan :

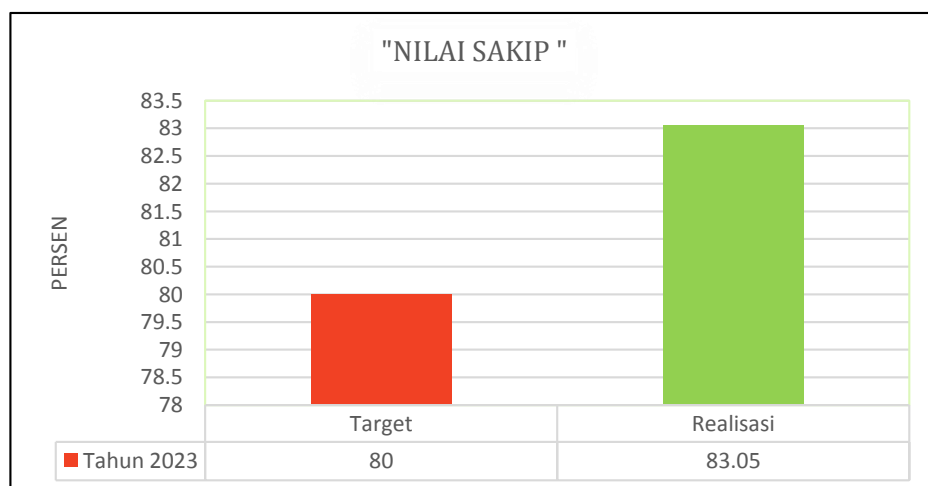
$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{97,72}{100} \times 100$$

$$= 97,72\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 1.474.309.242,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.150.558.300,-** atau **78,04%**.

Sasaran 3 (Sasaran Pendukung) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Grafik. 9



NILAI SAKIP

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel. 20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI SAKIP	80	83,05	103,81	

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **“NILAI SAKIP Hasil LHE Inspektorat”**.

Target Indikator sasaran Tahun 2023 adalah Nilai SAKIP 80(A), namun realisasinya belum dapat dirilis didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Nilai SAKIP berdasarkan LHE Inspektorat tahun 2022 yaitu 83,05(A), realisasi tersebut telah melebihi target yang direncanakan. Hal ini dapat tercapai karena telah dilakukan beberapa perbaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai dengan hasil coaching clinic Penguatan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, disamping itu beberapa rekomendasi LHE Inspektorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 21
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian	
NILAI SAKIP	70	82,23	117,47 %	75	83,05	110,73 %	80	0	0	80

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimana target setiap tahunnya dapat

tercapai dengan nilai yang meningkat dan melebihi dari target yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai SAKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Melakukan Reviu Dokumen Renstra secara berkala.
- b. Menyelaraskan dokumen Renstra OPD dengan RPJMD
- c. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- d. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- e. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- f. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- g. Memonitor pencapaian target kinerja eselon III dan IV
- h. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- j. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Menpan-RB dan LHE Inspektorat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 22
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2023	realisasi sampai dengan tahun 2023		
Nilai SAKIP	80	83,05	103,81	103,81%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Tahun 2023 yaitu 83,05 (A) telah melebihi dari target jangka menengah. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah

dalam pelaksanaan Coaching Clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa Rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi dengan definisi operasional, perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi dsb.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
 - Pelaksanaan tindak lanjut atas setiap rekomendasi dari evaluasi kinerja triwulanan lingkup bidang
 - Mencermati kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya riil cost
 - Koordinasi yang maksimal dengan PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal
 - Pengisian formulir evaluasi kinerja yang belum maksimal
 - Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward
 - Penetapan target kinerja yang tidak berdasarkan realisasi tahun sebelumnya
- ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
 - Mencermati pengisian formulir evaluasi kinerja sesuai dengan rencana aksi
 - Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment and reward untuk dijadikan sebagai payung hukum
 - Mencermati realisasi tahun lalu untuk menetapkan target tahun berikutnya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.
- Efisiensi belanja internet kantor yaitu, untuk biaya WIFI kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga upah jasa TRC dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 23
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran III :	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	80	83,05	103,81	2.847.919.108,-	2.586.745.126,-	90,83%

Tabel. 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran III	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	103,81	90,83%	9,17%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 103,81% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,83%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 9,17%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan**. Target 95% dan realisasi 98,77% dengan capaian kinerja 103,97%, dan menyerap anggaran sebesar 90,83%. Capaian kinerja program melebihi dari target karena terdapat beberapa kegiatan capaiannya kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan.

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 25
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	98,77%	103,97%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%

c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	90,62%	90,62%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	16 Org	13 Org	81,25%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	18 Org	18 Org	100 %
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	99,76%	99,76%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	100%

e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	350 Org	345 Org	98,57%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60 Kali	60 Kali	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	90,62%	90,62%
a.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	6 Unit	100%
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	8 Unit	5 Unit	62,5%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100%
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	3 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	106,5%	106,5%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	466 Surat	116,5%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	37 Rek	103 %
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	102,67%	102,67

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	13 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	37 Unit	108%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

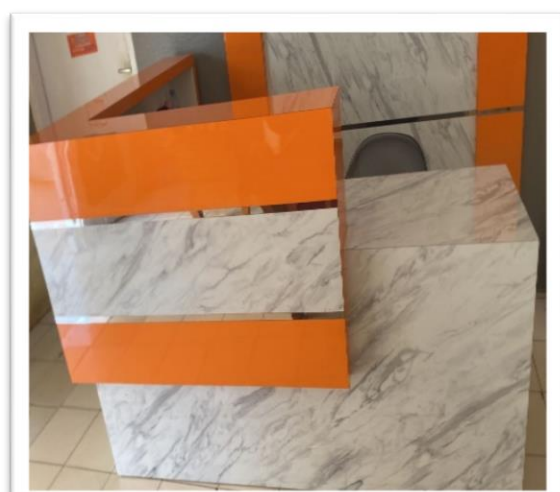
Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD



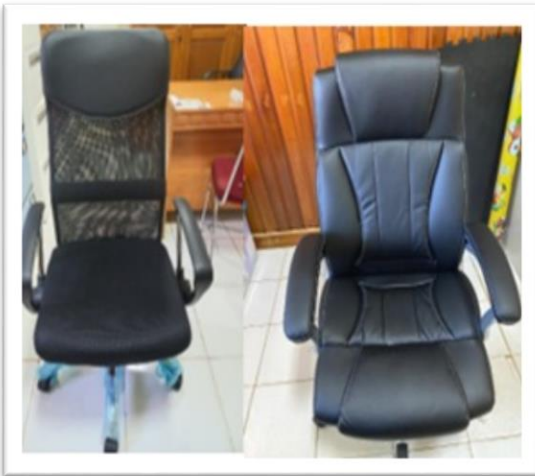
Pelaksanaan Monev Internal OPD



Pengadaan Lemari



Pengadaan Meja Receptionis



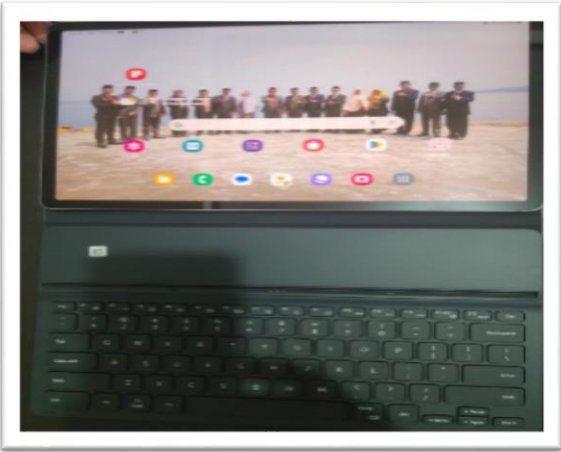
Pengadaan Kursi Kerja Pejabat



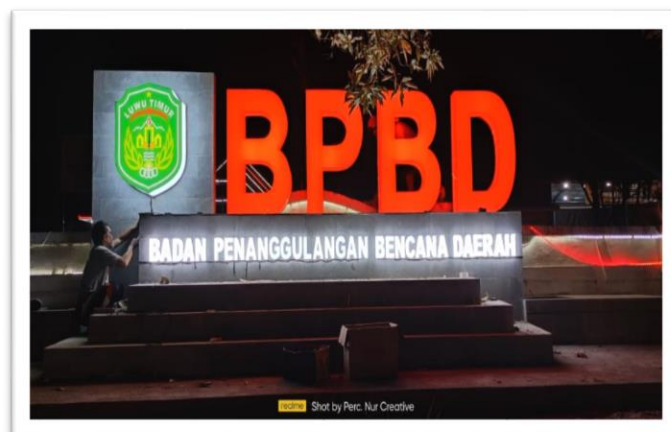
Pengadaan Kursi Staf



Pengadaan Printer



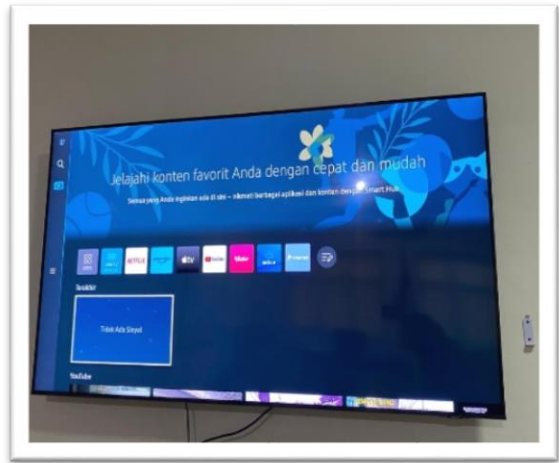
Pengadaan Notebook



Pembangunan Papan Nama Instansi/Kantor



Pengadaan AC



Pengadaan TV Monitor

7. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 103,81% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{83,05}{80} \times 100$$

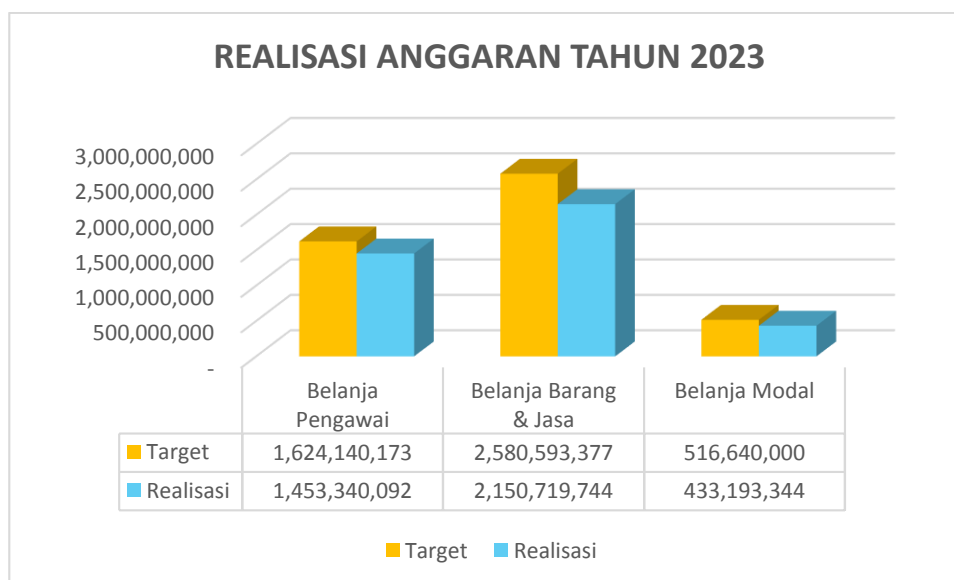
$$= 103,81\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 2.847.919.108,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.586.745.126,-** atau **90,83%**.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD-P untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar sebesar **Rp. 4.721.373.550,-** (*Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.624.140.173,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.580.593.377,-** dan belanja modal **Rp 516.640.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 41 sub kegiatan. Adapun target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik. 10
Realisasi Anggaran Tahun 2023



Diagram.1 Persentase Serapan Anggaran TA. 2023

Tabel. 26
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Target Triwulan s.d (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran sd 31 Desember 2023		Selisih		Total Sisa Anggaran	
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
					(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4,721,373,550	4,721,373,550	4,037,253,180	85,51	684,120,370	14,49	684,120,370	14,49
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2,847,919,108	2,847,919,108	2,586,745,126	90,83	261,173,982	9,17	261,173,982	9,17
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,451,420	105,451,420	84,486,780	80,12	20,964,640	19,88	20,964,640	19,88
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,199,300	46,199,300	37,606,825	81,40	8,592,475	18,60	8,592,475	18,60
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,925,200	4,925,200	4,665,100	94,72	260,100	5,28	260,100	5,28
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,354,340	4,354,340	3,276,900	75,26	1,077,440	24,74	1,077,440	24,74
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,972,580	49,972,580	38,937,955	77,92	11,034,625	22,08	11,034,625	22,08
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,626,778,373	1,626,778,373	1,453,051,792	89,32	173,726,581	10,68	173,726,581	10,68
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,578,340,173	1,578,340,173	1,407,540,092	89,18	170,800,081	10,82	170,800,081	10,82
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48,438,200	48,438,200	45,511,700	93,96	2,926,500	6,04	2,926,500	6,04
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,559,800	20,559,800	18,665,200	90,78	1,894,600	9,22	1,894,600	9,22

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,559,800	50,559,800	18,665,200	90,78	1,894,600	9,22	1,894,600	9,22
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73,160,000	73,160,000	61,498,661	84,06	11,661,339	15,94	11,661,339	15,94
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73,160,000	73,160,000	61,498,661	84,06	11,661,339	15,94	11,661,339	15,94
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	576,909,800	576,909,800	568,474,784	98,54	8,435,016	1,46	8,435,016	1,46
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,625,000	12,625,000	12,505,000	99,05	120,000	0,95	120,000	0,95
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,000,000	26,000,000	25,784,410	99,17	215,590	0,83	21,590	0,83
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,840,000	25,840,000	17,891,000	69,24	7,949,000	30,76	7,949,000	30,76
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,720,000	6,720,000	6,720,000	100	-	-	-	-
	Fasilitas Kunjungan Tamu	24,750,000	24,750,000	24,696,000	99,78	54,000	0,22	54,000	0,22
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480,794,800	480,794,800	480,878,374	99,98	96,426	0,02	96,426	0,02
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201,240,000	201,240,000	169,904,245	84,43	31,335,775	15,57	31,335,775	15,57
	Pengadaan Mebel	20,500,000	20,500,000	20,250,000	98,78	250,000	1,22	250,000	1,22
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85,000,000	85,000,000	84,804,245	99,77	195,755	0,23	195,755	0,23
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,100,000	33,100,000	33,100,000	100	-	-	-	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,459,715	79,459,715	73,815,164	92,90	5,644,551	7,10	5,644,551	7,10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,807,475	8,807,475	7,981,700	90,62	825,775	9,38	825,775	9,38
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,252,240	51,252,240	46,433,464	90,60	4,818,776	9,40	4,818,776	9,40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,400,000	19,400,000	19,400,000	100	-	-	-	-
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	164,360,000	164,360,000	156,848,500	95,43	7,511,500	4,57	7,511,500	4,57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113,300,000	113,300,000	113,094,500	99,82	205,500	0,18	205,500	0,18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,410,000	25,410,000	18,855,000	74,20	6,555,000	25,80	6,555,000	25,80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,650,000	25,650,000	24,899,000	97,07	751,000	2,93	751,000	2,93
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,873,454,442	1,873,454,442	1,450,508,054	77,42	422,946,388	22,58	422,946,388	22,58
9	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	194,640,642	194,640,642	136,888,800	70,33	57,751,842	29,67	57,751,842	29,67
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	174,995,642	174,995,642	117,243,800	67,00	57,751,842	33,00	57,751,842	33,00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	19,645,000	19,645,000	19,645,000	10,00	-	-	-	-

10	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	480,740,600	480,740,600	300,456,700	62,50	180,283,900	37,50	180,283,900	37,50
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	175,270,300	175,270,300	114,890,100	65,55	60,380,200	34,45	60,380,200	34,45
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	31,425,900	31,425,900	24,428,900	77,73	6,997,000	22,27	6,997,000	22,27
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	73,000,000	73,000,000	72,482,000	99,29	518,000	0,71	518,000	0,71
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	53,054,800	53,054,800	45,966,200	86,64	7,088,600	13,36	7,088,600	13,36
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	29,890,000	29,890,000	25,161,500	84,18	4,728,500	15,82	4,728,500	15,82
	Penyusunan Rencana Kontijensi	98,963,100	98,963,100	6,230,000	6,30	92,733,100	93,70	92,733,100	93,70
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19,136,500	19,136,500	11,298,000	59,04	7,838,500	40,96	7,838,500	40,96
11	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	797,928,000	797,928,000	713,212,800	89,38	84,715,200	10,62	84,715,200	10,62
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	637,570,000	637,570,000	623,552,750	97,80	14,017,250	2,20	14,017,250	2,20
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	52,370,000	52,370,000	25,993,650	49,63	26,376,350	50,37	26,376,350	50,37
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	74,678,000	74,678,000	63,666,400	85,25	11,011,600	14,75	11,011,600	14,75
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	100	20,000,000	100
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	13,310,000	13,310,000	-	-	13,310,000	100	13,310,000	100
12	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	400,145,200	400,145,200	299,949,754	74,96	100,194,446	25,04	100,194,446	25,04
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19,972,800	19,972,800	7,293,300	36,52	12,679,500	63,48	12,679,500	63,48
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75,277,400	75,277,400	42,950,800	57,06	32,326,600	42,94	32,326,600	42,94
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	304,895,000	304,895,000	249,705,654	81,90	55,189,346	18,10	55,189,346	18,10
Jumlah		7,721,373,550	7,721,373,550	4,037,253,180	85,51	684,120,370	14,49	684,120,370	14,49

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

Tabel.27
Permasalahan dan Solusi

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target sebanyak 2 dokumen terealisasi 2 dokumen yaitu dokumen renja pokok 2024 & Renja Perubahan 2023 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran sebesar Rp 46.199.300 dan realisasi 81,40%. Terdapat sisa anggaran Rp 8.592.475 terdiri dari Rp 732.475 sisa belanja e-catalog. Terdapat sisa belanja makan minum rapat yang cukup besar karena beberapa kegiatan rapat yang dilaksanakan sekaligus membahas beberapa kegiatan lainnya. Dan terdapat sisa anggaran perjalanan dinas, karena direncanakan pelaksanaan coaching penganggaran untuk 3 org namun hanya diikuti oleh 1 org saja.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu RKA-SKPD TA. 2024 & RKAP-SKPD TA. 2023 dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran sebesar Rp 4.925.200 dan trealisasi 94,72%. Terdapat sisa anggaran Rp 260.100 yang merupaka sisa belanja E-Catalog	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu dokumen DPA-SKPD Tahun 2023 & DPPA-SKPD TA. 2023 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran Rp 4.354.340, Realisasi keuangan (75,26%). Terdapat sisa anggaran Rp 1.077.440 terdiri dari Rp 362.050 merupakan sisa belanja e-catalog. Dan untuk belanja bahan komputer masih terdapat sisa sebesar Rp 715.400 disediakan untuk penggantian cartridge namun tidak digunakan karena kondisi printer masih baik. Sehingga realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan Target 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen yaitu LKPJ, LPPD, LAPKIN 2022 dan Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022, Laporan Evaluasi RKPD TW I, II & III TA. 2023 dan Laporan Kinerja Triwulan I, II & III TA. 2023 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran sebesar Rp 49.972.580, dan realisasi 77,92%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 11.034.625 terdiri dari Rp 343.180 yang merupakan sisa belanja e-catalog. Dan belanja makan minum rapat Rp 2.100.000 yang cukup besar karena beberapa kegiatan rapat yang dilaksanakan sekaligus membahas beberapa kegiatan lainnya. Dan terdapat sisa anggaran perjalanan dinas Rp 8.025.045 karena direncanakan untuk kegiatan APE, namun kegiatan tersebut tertunda pelaksanaannya.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 16 org dan terealisasi hanya 13 org sehingga capaian kinerja 81,25 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional dan staf yang masih kosong dan sampai dengan akhir tahun 2023 belum terisi personilnya.	Disediakan anggaran sebesar Rp 1.578.340.173 dan realisasi 89,18%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 170.800.081 karena Disediakan anggaran untuk jabatan struktural eselon II, Jabatan fungsional dan staf yang masih kosong dan sampai dengan akhir tahun 2023 belum terisi personilnya.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulanan 2 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan Laporan semester 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran sebesar Rp 48.438.200 dan realisasi 93,96%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.926.500 terdiri dari 971.500 merupakan sisa belanja e-catalog, Rp 430.000 merupakan sisa perjalanan dinas dan Rp 1.000.000 yaitu belanja honor upah jasa tenaga administrasi 1 bulan yang tidak terealisasi karena adanya pergantian upah jasa.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran sebesar Rp 20.559.800 dan realisasi 90,78%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.894.600 terdiri dari 160.600 merupakan sisa belanja e-catalog, Rp 990.000 merupakan sisa belanja perjalanan dinas sedangkan belanja cetak Rp 744.000 tidak realisasi karena laporan/data terkait penatausahaan BMD dikirim dalam bentuk softcopy.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, target sebanyak 18 orang dan terealisasi 18 org dengan capaian kinerja 100%.(Workshop Aplikasi SIRUP 1 org, Aplikasi Gaji 2 org, Pelatihan Water Rescue 1 orang, Bimtek PRB 2 orang, Pelatihan Pusdalops 3 org, Bimtek PPK Tipe C 2 org, Bimtek Jitupasna 2 org, Bimtek MC 2 org, Bimtek SKP 1 org, Latpim 2 org) dengan capaian kinerja 100%. pelaksanaan sub kegiatan	Disediakan anggaran sebesar Rp 73.160.000, Dan realisasi keuangan 84,06%. Terdapat sisa anggaran Rp 11.661.339 terdiri dari Rp 3.500.000 merupakan sisa belanja kursus/pelatihan yang tidak bisa terpakai karena tidak mencukupi untuk membayar biaya kontribusi diklat/bimtek. Dan terdapat sisa anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 8.161.339 karena disediakan anggaran perjalanan dinas untuk bimtek PPK-Type C tetapi tidak direalisasikan karena pelaksanaannya bertepatan dengan kegiatan yang lain sehingga tidak bisa dibayarkan.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.

						berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta.		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 20 jenis yaitu BBM operasional 2 jenis dan 18 jenis alat dan bahan kebersihan dengan persentase capaian kinerja 100%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Disediakan anggaran sebesar Rp 26.000.000, dan realisasi keuangan 99,17%. Terdapat sisa anggaran Rp 215.590 merupakan sisa belanja dan penggunaan alat dan bahan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan	Disediakan anggaran sebesar Rp 25.840.000, dan realisasi keuangan (69,24%), Terdapat sisa belanja yang cukup besar yaitu Rp 7.949.000 karena terdapat belanja cetak baliho Rp 3.000.000 untuk dipasang di kecamatan namun tidak realisasi karena papan himbuan yang ada kecamatan mengalami kerusakan. Sisa belanja lainnya adalah belanja cetak spanduk yang sifatnya disediakan disesuaikan dengan pelaksanaan hari-hari besar atau perayaan hari-hari tertentu. Penggunaan anggaran juga didasarkan pada kebutuhan kantor.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 60 expl dan realisasi 60 expl yaitu koran lokal 12 expl, koran nasional 12 expl, koran regional 36 expl dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 6.720.000, dan realisasi keuangan sebesar (100%),	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target 350 org dan terealisasi 345 org dengan capaian kinerja 98,57%	Disediakan anggaran sebesar Rp 24.750.000 dan realisasi keuangan (99,78%),	
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target sebanyak 60 kali dan realisasi 60 kali, capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran sebesar Rp 480.974.800, dengan realisasi keuangan (99,98%)	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 20 jenis yaitu BBM operasional 2 jenis dan 18 jenis alat dan bahan kebersihan dengan persentase capaian kinerja 100%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Disediakan anggaran sebesar Rp 26.000.000, dan realisasi keuangan 99,17%. Terdapat sisa anggaran Rp 215.590 merupakan sisa belanja dan penggunaan alat dan bahan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 6 unit dan realisasi 6 unit yaitu Pengadaan Kursi Eselon III 1 unit, Kursi Eselon IV 1 unit, Kursi staf 2 unit, Lemari Display 1 unit dan Meja Receptionis 1 unit dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran sebesar Rp 20.500.000, Dan terealisasi (98,78%). Terdapat sisa anggaran Rp 250.000 merupakan sisa belanja melalui e-catalog	Kedepannya agar PPTK/PPK melakukan percepatan pengadaan BARJAS sesuai anggaran kas agar sisa belanja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran.
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan dengan target 8 unit dan realisasi 5 unit yaitu Printer 3 unit, Notebook 1 unit dan Scanner 1 unit. Dengan capaian kinerja 62,5%. Realisasi tidak sesuai target karena BM. Pengadaan Komputer PC tidak realisasi karena harga di e-catalog lebih tinggi dari Harga di DPA-SKPD.	Disediakan anggaran sebesar Rp 62.640.000 Dan terealisasi (50,69%). Terdapat sisa anggaran Rp 30.890.000 yaitu Belanja Modal Pengadaan Komputer PC yang tidak realisasi karena harga di E-Catalog lebih tinggi dari harga di DPA-SKPD	Kedepannya agar PPTK/PPK mencermati harga e-catalog untuk disesuaikan dengan harga satuan .
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 1 unit dan realisasi 1 unit yaitu Pembangunan Papan Nama Kantor/Instansi dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran sebesar Rp 85.000.000,- dan realisasi 99,77%.Terdapat anggaran Rp 195.755 merupakan sisa kontrak/SPK	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator output yaitu Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 3 unit dan realisasi 3 unit (100%) yaitu pengadaan AC 2 unit dan TV monitor 1 Unit	Disediakan anggaran sebesar Rp 33.100.000,- dan realisasi 100%.	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dengan target sebanyak 400 surat dan realisasi 466 surat dengan persentase capaian kinerja 116,5%. Capaian kinerja melebihi dari target karena terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan memerlukan persuratan yang banyak yang mengundang Vertikal, OPD dan kecamatan, masyarakat dsb.	Disediakan anggaran sebesar Rp 8.807.475,- dan realisasi (90,62%). Terdapat sisa anggaran Rp 825.775 yang terdiri dari Rp 675.775 merupakan sisa belanja E-Catalog dan Rp 150.000 adalah biaya paket pengiriman sifatnya disediakan namun tidak realisasi karena tidak terdapat laporan ataupun data yang dikirim melalui Pos atau jasa pengiriman lainnya.	Kedepannya agar PPTK/PPK mencermati belanja yang tidak digunakan untuk disesuaikan pada perubahan anggaran

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dengan target sebanyak 36 rekening dan realisasi 37 rekening yaitu Listrik BPBD 12 rek, Token Listrik 1 rek, Air kantor 12 rek, kartu halo 12 rek. Capaian kinerja sebesar 102,77%	Disediakan anggaran sebesar Rp 51.252.240,- dan Realisasi keuangan 90,60%. Terdapat sisa anggaran Rp 4.818.776 terdiri dari Rp 363.523 sisa belanja Kartu Halo (Nomor ON CALL BPBD), belanja air sebesar Rp 1.215.700 karena pemakaian air dalam kurun waktu 3 bulan terakhir mengalami penurunan karena adanya pengaturan jadwal pembagian air sedangkan belanja listrik juga mengalami penurunan pemakaian karena terdapat 3 AC yang tidak berfungsi karena mengalami rusak berat.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang setiap triwulan. Dan terealisasi sebanyak 2 org yaitu Upah Jasa Cleaning Service dan Pejabat Pengadaan Barjas dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran sebesar Rp 19.400.000,-. Dan realisasi (100%).	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 13 unit setiap triwulan dan realisasi sebanyak 13 unit yaitu Rescue 1 unit, Hilux 1 unit, Truk Serbaguna 1 unit, Mobil Operasional TRC 1 unit dan motor 6 unit, dengan capaian kinerja 100%. Capaian kurang dari target disebabkan karena pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran sebesar Rp 113.300.000,- Dan terealisasi (99,82%). Terdapat sisa anggaran Rp 205.500 yang merupakan sisa belanja. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan.	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sebanyak 34 unit dan terealisasi 37 unit yaitu AC 7 unit, printer 10 unit, Laptop 10 unit, chainsaw 5 unit, Mesin Babat 1 unit, Tenda 4 unit, dengan persentase capaian kinerja 108,3%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran sebesar Rp 25.410.000,- dan realisasi (74,20%). Terdapat sisa anggaran Rp 6.555.000 terdiri dari Rp 4.500.000 disediakan untuk pemeliharaan genset, namun tidak realisasi karena alat tersebut masih dalam kondisi baik dan Rp 1.400.000 disediakan untuk pemeliharaan perahu karet namun tidak realisasi karena tidak terdapat tempat/bengkel yang bisa memperbaiki perahu karet.	Kedepannya agar PPTK/PPK mencermati belanja yang kemungkinan tidak digunakan untuk disesuaikan pada perubahan anggaran
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 2 unit dan realisasi kinerja masih 100%. Adapun pemeliharaan yang dilakukan adalah pengecatan Atap kantor BPBD, perbaikan Pintu Toilet dan PPID. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 25.650.000,- dan realisasi (97,07%) Terdapat sisa anggaran Rp 751.000 yang merupakan sisa belanja. Penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			

1	05	01	2.01	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%).	Disediakan anggaran sebesar Rp. 174.995.642,- dan realisasi keuangan Rp. 117.243.800,- atau sebesar 66,99%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 57.751.842 terdiri dari ,- Rp 755.042 merupakan sisa belanja e-catalog, belanja makan minum rapat Rp 5.500.000 direncanakan untuk kegiatan workshop 2 kali namun hanya 1 kali dilaksanakan, belanja honorarium narasumber Rp 15.500.000 untuk pelaksanaan workshop, FGD tingkat Kecamatan dan konsultasi publik disediakan untuk honor pejabat eselon II/disetarakan untuk (Kepala BPBD) namun tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tersebut bertepatan dengan Dinas Luar. Terdapat sisa belanja sewa kendaraan (transport peserta) Rp. 25.100.000,- disediakan untuk peserta workshop KRB, namun tidak direalisasikan karena kegiatan tersebut dilaksanakan di Kec. Malili, sehingga peserta dari OPD yang berasal dari Kec. Malili tidak bisa dibayarkan sedangkan peserta dari kecamatan menggunakan biaya perjalanan dinas dari wilayah masing-masing. Tersisa belanja sewa hotel narasumber Rp 6.300.000 karena pelaksanaan workshop dan FGD dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan pertimbangan waktu pengumpulan data harus segera dilaksanakan oleh Tim Penyusun. Sedangkan sisa perjalanan dinas Rp 4.596.800 tidak realisasi karena perjalanan dinas yang dilakukan tidak menggunakan biaya penginapan.	Kedepannya PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas sehingga sisa anggaran yang tidak realisasi dapat disesuaikan pada perubahan anggaran
1	05	01	2.01	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 250 orang dan realisasi 250 org (100%). Peserta sosialisasi diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan kabupaten.	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 19.645.000,- dan realisasi keuangan Rp. 19.645.000,- atau sebesar 100%.	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	01	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal, target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%).	Disediakan Anggaran sebesar Rp 175.270.300,- dan realisasi keuangan Rp. 114.890.100,- atau sebesar 65,55%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.60.380.200 terdiri dari ,- Rp 319.200 merupakan sisa belanja e-catalog, belanja makan minum rapat Rp 9.000.000 direncanakan untuk kegiatan workshop 2 kali namun hanya 1 kali dilaksanakan, belanja honorarium narasumber Rp 15.500.000 untuk pelaksanaan workshop, FGD tingkat Kecamatan dan konsultasi publik disediakan untuk honor pejabat eselon II/disetarakan untuk (Kepala BPBD) namun tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tersebut bertepatan dengan Dinas Luar. Terdapat sisa belanja sewa kendaraan (transport peserta) Rp. 23.540.000,- disediakan untuk peserta workshop RPB, namun tidak direalisasikan karena kegiatan tersebut dilaksanakan di Kec. Malili,	Kedepannya PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas sehingga sisa anggaran yang tidak realisasi dapat disesuaikan pada perubahan anggaran

							sehingga peserta dari OPD yang berasal dari Kec. Malili tidak bisa dibayarkan sedangkan peserta dari kecamatan menggunakan biaya perjalanan dinas dari wilayah masing-masing. Tersisa belanja sewa hotel narasumber Rp 6.300.000 karena pelaksanaan workshop dan FGD dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan pertimbangan waktu pengumpulan data harus segera dilaksanakan oleh Tim Penyusun. Sedangkan sisa perjalanan dinas Rp 5.721.200 tidak realisasi karena perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak menggunakan biaya penginapan.	
1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah aparaturnya dan warga Negara yang ikut pelatihan, dengan target sebanyak 50 orang. Dan realisasi 50 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 31.425.900,- dan realisasi keuangan Rp. 24.428.900,- atau sebesar 77,73%, Terdapat sisa anggaran Rp 6.997.000 terdiri dari Rp 551.000 merupakan sisa belanja e-catalog, belanja sewa tempat pertemuan Rp 1.500.000,- tidak realisasi karena tempat pelaksanaan kegiatan di aula kantor di Desa Pongkeru Kec. Malili. Dan terdapat sisa belanja sewa hotel narasumber Rp 3.600.000 karena narasumber yang diundang yaitu Daops Manggala Agni Wilayah IV Malili dan Kepala Unit Pos Siaga SAR Malili berdomisili di Kec. Malili sehingga tidak direalisasikan	Kedepannya PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas sehingga sisa anggaran yang tidak realisasi dapat disesuaikan pada perubahan anggaran
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 21 unit dan realisasi 21 unit dengan capaian kinerja 100%. Adapun realisasinya adalah Pengadaan Perahu Karet 1 unit dan Velbed 20 unit.	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 72.482.000,- atau sebesar 99,29%.	
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk, dengan target sebanyak 4 desa dan realisasi 4 desa dengan capaian kinerja 100%. Adapun Desa Tangguh Bencana yang dibentuk adalah Desa Langkea Raya, Desa Atue, Desa Kalaena dan Desa Bahari.	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 53.054.800,- dan realisasi keuangan Rp. 45.966.200,- atau sebesar 86,63%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.088.600 terdiri dari belanja cetak spanduk Rp 800.000,- disediakan untuk cetak 3 spanduk, namun yang direalisasikan hanya 2 spanduk di setiap desa yaitu pada persiapan pembentukan Destana dan lokakarya destana. Terdapat sisa anggaran belanja honorarium narasumber eselon II (Ka. BPBD) namun tidak realisasi karena terkendala Dinas Luar. Sedangkan untuk biaya transportasi narasumber terdapat sisa Rp 340.000 karena biaya transportasi kedatangananya dipertanggungjawabkan pada kegiatan Penilaian IKD yang lebih dahulu dilaksanakan. Dan terdapat sisa perjalanan dinas yang tidak digunakan Rp 2.198.600	

1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat, dengan target sebanyak 43 orang dan realisasi 43 orang dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 29.890.000,- dan realisasi keuangan Rp. 25.161.500,- atau sebesar 84,18%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.728.500 terdiri dari belanja makan dan minum rapat Rp. 2.750.000,-, tidak realisasi karena dianggarkan jumlah peserta sebanyak 50 orang tetapi yang mengikuti diklat TRC hanya 43 orang. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa orang TRC yang melakukan pemasangan tenda pada kegiatan Jambore PKK Se-Sul-Sel. Dan terdapat sisa perjalanan dinas dalam daerah Rp 1.265.000 tidak realisasi karena kegiatan ini dilaksanakan di kec. malili.	
1	05	01	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal, target 1 dokumen dan realisasi 0 dokumen (0%). Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena rencana awal pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dengan Tenaga Ahli mengalami pergeseran jadwal, dimana pada saat penentuan jadwal ulang pelaksanaan dari BPBD bertepatan dengan jadwal kegiatan Tenaga Ahli pada daerah lain, hanya belanja perjalanan dinas luar daerah yang digunakan sebesar Rp. 6.230.000,- karena dilaksanakan koordinasi dengan BPBD Provinsi terkait tenaga ahli tim penyusun	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 98.890.000,- dan realisasi keuangan Rp. 6.230.000,- atau sebesar 6,30%. Terdapat sisa anggaran Rp. 92.733.100,- Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena rencana awal pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dengan Tenaga Ahli mengalami pergeseran jadwal, dimana pada saat penentuan jadwal ulang pelaksanaan dari BPBD bertepatan dengan jadwal kegiatan Tenaga Ahli pada daerah lain, hanya belanja perjalanan dinas luar daerah yang digunakan sebesar Rp. 6.230.000,- karena dilaksanakan koordinasi dengan BPBD Provinsi terkait tenaga ahli tim penyusun	
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 org dan realisasi 250 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan Anggaran sebesar Rp. 19.136.500,- dan realisasi keuangan Rp. 11.298.000,- atau sebesar 59.04%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.838.500 terdiri dari belanja makan minum tamu Rp. 1.225.000,- , belanja sewa alat studio Rp 1.000.000 yang tidak realisasi karena Pelaksanaan Apel Siaga bencana dirangkai dengan Hari Bela Negara sehingga terdapat sharing anggaran dengan Badan Kesbang sebagai penyelenggara HKN. Disediakan anggaran perjalanan dinas untuk konsultasi ke BPBD Provinsi dan pendistribusian surat ke kecamatan, namun tidak realisasi terkendala waktu yang terbatas sedangkan sedangkan pendistribusian surat tidak dilakukan karena peserta yang diundang berasal dari kec. malili.	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			

1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2023 (341 kejadian), semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat.	Disediakan anggaran sebesar Rp 637.570.000,- Terealisasi sebesar Rp.623.552.750,- atau sebesar 97.80% dari Anggaran tidak terealisasi 100% di sebabkan karena jumlah personil TRC hingga saat ini 21 orang dari estimasi anggaran yang di sediakan 22 orang setelah perubahan anggaran. hal ini mempengaruhi realisasi anggaran khususnya belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan. Belanja bahan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 3.545.000,- di karenakan kurangnya aktivitas lapangan yang membutuhkan bahan bakar dan pelumas.	PPTK segera memeriksa, merampungkan dan mengevaluasi SPJ administrasi keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan, agar laporan pertanggungjawaban tahun 2023 segera selesai dan lengkap.
1	05	01	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 1.283 jiwa (633 Laki-laki dan 650 Perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Disediakan anggaran sebesar Rp 52.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.993.650,- , atau sebesar 49.63 % tidak tereliasasi 100% dari target anggaran karena sifatnya disediakan. terdapat sisa anggaran paling banyak pada belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak Rp. 5.826.350,-dan Belanja Bahan Bakar Minyak/pelumas sebesar Rp. .10.825.000,- dan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp. 6.825.000,-.	PPTK segera memeriksa, merampungkan dan mengevaluasi SPJ administrasi keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan, agar laporan pertanggungjawaban tahun 2023 segera selesai dan lengkap.
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 1.283 jiwa (663 Laki-laki dan 650 Perempuan) dan semuanya diberikan bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda).	Disediakan anggaran sebesar Rp . 74.678.000- dengan realisasi sebesar Rp. 63.666.400,- atau 85.25% tidak terealisasi 100% karena anggaran pada sub. kegiatan ini sifatnya di siapkan. selain hal tersebut karena adanya juga bantuan logistik dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang diantar langsung oleh BPBD Prov beserta timnya dari sisa anggaran belanja bahan pangan sebesar 1.000.000,- dan belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya sebesar Rp. 4.500.000,- tidak di gunakan.	PPTK segera memeriksa, merampungkan dan mengevaluasi SPJ administrasi keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan, agar laporan pertanggungjawaban tahun 2023 segera selesai dan lengkap.
1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator Output adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 37 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana	Disediakan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- Namun realisasi keuangan sampai pada triwulan IV masih 0%, hal ini disebabkan karena anggaran sifatnya disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat.	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. pada periode Triwulan IV tidak ada Masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) yang diterima oleh TRC BPBD.	Dan disediakan anggaran sebesar Rp 13.310.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- hal ini disebabkan karena pada triwulan IV tahun 2023 tidak ada kejadian akibat Covid 19 dan bencana wabah penyakit lainnya	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			

1	05	01	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun sebanyak 3 dokumen. Dan realisasi 3 dokumen (100%). Yaitu SOP bidang Kedaruratan & Logistik, SOP Bidang Pencegahan dan SOP Sekretariat	Disediakan anggaran sebesar Rp 7.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 7.293.300, terdapat SPJ pertanggungjawaban yang belum di-GUKan	
1	05	01	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi sebanyak 1 Forum. Dan realisasi 1 Forum PRB (100%)	Disediakan anggaran sebesar 10.315.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 38.660.800 terdapat SPJ pertanggungjawaban yang belum di-GUKan	
1	05	01	2.04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Target output sub kegiatan pada yaitu tersusunnya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 100%	Disediakan anggaran sebesar Rp. 304.895.000,- yang terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 660.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.000.000,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 300.000,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 375.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.250.000,-, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat Pra DESain Arsitektural 13.500.000,-, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survey Rp. 10.000.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 31.4100.000,-, Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Rp. 78.400.000,-, Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Rp. 164.000.000,-, Realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar 81,90%, dengan rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 610.955,-; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 941.510,-; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 294.000,-; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 333.000,-; elanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.250.000,-; Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat Pra DESain Arsitektural 13.500.000,-; Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survey Rp. 7.780.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 30.189.090,-; Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Rp. 59.125.420,-; Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Rp. 131.681.679,-	

BAB 4

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.037.253.180,- (85,51%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.453.340.092,- (89,48%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.150.719.744,- (83,34%) dan Belanja Modal Rp 433.193.344,- (83,85%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2023 sebesar **133,33%** dengan ***predikat BAIK***.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis II yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Tahun 2023 sebesar **100%** dengan realisasi **97,72% predikat BAIK**
- d. Persentase Capaian Kinerja sasaran III (sasaran pendukung) yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2023 sebesar **103,81%**, dengan **predikat BAIK** dengan Nilai SAKIP yang diperoleh yaitu 83,05 (A).
- e. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 91,46%
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 100%
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 100%

- f. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2023 terhadap beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
- Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai rencana aksi
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
 - Terdapat harga barang di E-Catalog yang lebih tinggi dari Harga di DPA-SKPD
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
 - Terdapat papan himbauan peringatan dini bencana yang rusak berat sehingga berdampak kepada capaian SPM Pelayanan informasi rawan bencana yang kurang dari 100%
- g. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi
 - Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
 - Memaksimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA program diakhir tahun
 - Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 05 Februari 2024

Pt. KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002

LAMPIRAN 1

TINDAK LANJUT LHE KEMENTERIAN PAN-RB

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Melakukan revidi dokumen perencanaan dengan memastikan rumusan perencanaan mengacu pada isu strategis yang tertuang dlm dokumen perencanaan	Perbaikan Dokumen Renstra Bab IV Tujuan dan Sasaran (Rumusan tujuan dan sasaran telah dilengkapi dengan indikator dan definisi operasional	Selesai
2.	Memperbaiki kualitas penjenjangan kinerja OPD dan memastikan bahwa penjenjangan kinerja memiliki hubungan kausalitas dengan mempertimbangkan CSF di setiap level sampai level operasional	Perbaikan Pohon Kinerja, mulai dari kinerja sasaran strategis, kinerja urusan, kinerja taktikal sampai kinerja operasional	Selesai
3.	Memastikan penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya mengacu kepada capaian tahun sebelumnya	Perbaikan Target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Selesai
4.	Melengkapi dokumen IKU dengan memberikan definisi operasional dan penjelasan detail formulasi perhitungan	Perbaikan Dokumen IKU dan telah dilengkapi dengan penjelasan operasional dan formulasi perhitungan	Selesai

5.	Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian kinerja serta memberikan data dan bukti dukung	Perbaikan Dokumen LKJ Tahun 2023 disertai analisis dan dilengkapi dengan data dan bukti dukung/dokumentasi pelaksanaan kegiatan	Selesai
6.	Pemanfaatan informasi pada laporan kinerja sebagai masukan dalam perencanaan tahun berikutnya seperti penetapan target yang lebih baik	Perbaikan Target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II (Target melebihi capain tahun sebelumnya	Selesai

LAMPIRAN 2

TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT TAHUN 2022

***Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Membuat target kinerja yang lebih menantang namun diyakini dapat dicapai	Penetapan target kinerja telah mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dijadikan sebagai dasar dalam menentukan besaran target.	Selesai
2.	Setiap pegawai (staf dan fungsional) merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja selaras dengan PK atasannya setiap awal tahun	Perencanaan kinerja atasan telah diturunkan ke perencanaan kinerja staf/bawahan	Selesai
3.	Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Laporan LKj telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (SPM)	Selesai
4.	Analisis yang disampaikan dalam laporan kinerja menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya	Analisis yang dituangkan dalam Laporan Kinerja telah menghasilkan umpan balik berupa perbaikan perencanaan kinerja dan strategi utamanya adalah Indikator Kinerja Utama OPD. (Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah)	Selesai

5.	Evaluasi pengukuran kinerja per triwulan, selain menganalisis capaian kinerja dan efesiensi kinerja, juga seharusnya mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan penunjang keberhasilan program	Dalam Lkj telah dijelaskan efektifitas atau keberhasilan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran OPD melalui Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	Selesai
----	---	---	---------